

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di berbagai Negara, Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggungjawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Perlindungan sosial menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, tidak hanya terjadi pada masyarakat miskin saja, tetapi juga pada beberapa Negara berkembang dan bahkan Negara maju.¹

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), istilah perlindungan sosial mencakup jaminan sosial yang sangat erat kaitannya dengan program pengentasan kemiskinan, dan menjamin akses pada pelayanan kesehatan melalui inisiatif yang berbasis publik, perorangan atau masyarakat. Untuk memberikan keabsyahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial yang termuat dalam rencana pembangunan nasional merupakan suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat yang paling miskin dan kelompok masyarakat miskin.²

¹ Sri Lestari Rahayu. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia, Sekarang dan ke Depan*. Fokusmedia. Bandung. Hlm : 123

² Ibid., hlm. 124.

Mekanisme perlindungan sosial ini salah satunya dapat berupa bantuan sosial. Bantuan Sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Dasar hukum mengenai kewenangan pelaksanaan bantuan sosial tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Dimana kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD melalui program yang telah ditetapkan.

Salah satu program yang merupakan kebijakan perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelola bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. PKH memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan *Millenium Develepment Goals* (MDGs), yang terdiri dari pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan.⁴

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia telah di uji coba pada Juli 2007 di 7 provinsi (Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo). Tahun 2012, PKH telah menjadi program nasional, yaitu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Sampai pada tahun 2014 sudah menyebar di 34 provinsi dengan 418 kab/kota dan 4870 kecamatan.⁵ Program Keluarga Harapan (PKH) dikelola oleh Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. Peserta PKH adalah RTSM yang memerlukan tenaga pendampingan.

³ Ibid., hlm. 2.

⁴ Ibid., hlm. 128-130.

⁵ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2015. Cetakan ke-I. hlm. 29

Pendamping PKH direkrut oleh UPPKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan masyarakat penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.⁶

Pendamping PKH atau Pekerja Sosial Pendamping PKH, direkrut dari masyarakat secara terbuka. Dengan latar belakang pendidikan sarjana, para pendamping membantu RTSM/KSM peserta PKH memanfaatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Para pendamping juga berperan mendorong keluarga meningkatkan kapasitasnya untuk penghidupan yang lebih baik.⁷ Sebagai salah satu stakeholder yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin, keberadaan pendamping perlu di perhatikan lebih khusus karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika fungsi dan peranannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan dari Program Keluarga Harapan tersebut tidak dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud.

Hingga akhir 2014, jumlah staf UPPKH pusat 50 orang, staf pendukung termasuk pendamping 13.170 orang dan operator 1.128 orang.⁸ Setiap pendamping akan mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping memiliki tugas sebagai berikut :⁹

1. Mentaati seluruh peraturan PKH yang telah ditetapkan dalam buku pedoman PKH;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada peserta PKH dan masyarakat umum tentang PKH;
3. Melakukan pertemuan awal dengan calon penerima manfaat bantuan Keluarga Sangat Miskin pada awal pelaksanaan PKH;
4. Menyusun jadwal kerja antara lain kunjungan ke lapangan di tempat KSM, kunjungan ke Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan, kunjungan ke PT Pos untuk mendampingi penyaluran bantuan ke KSM dan urusan Penyediaan layanan jika diperlukan;

⁶ Sri Lestari Rahayu. op. cit.. hlm. 134.

⁷ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. op. cit. hlm. 46

⁸ Ibid., hlm. 47

⁹ Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 38A/SK/JS/IX/2013, tentang pengangkatan tenaga pendamping pengembangan kabupaten/kota dan kecamatan Porgram Keluarga Harapan tahun 2013.

5. Melakukan koordinasi dengan petugas sekretariat UPPKH dan tenaga operator UPPKH kabupaten/kota, petugas instansi terkait terutama penyedia layanan kesehatan dan pendidikan dalam pertemuan awal;
6. Melakukan Pemuktahiran data KSM untuk dilaporkan ke UPPKH Kab/kota.
7. Memotivasi kelompok KSM untuk dapat merencanakan penggunaan dana secara tepat dan produktif.
8. Menjelaskan *Family Development Session (FDS)* kepada KSM untuk mendukung peningkatan kesadaran akan pentingnya, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan keluarga;
9. Menghimpun dan melaporkan pengaduan masyarakat ke sekretariat UPPKH Kab/kota;
10. Melakukan pertemuan rutin bersama kelompok KSM;
11. Membantu pengisian formulir peserta PKH;
12. Menginformasikan, menyusun jadwal, dan mendampingi peserta dalam rangka mengambil bantuan dari Lembaga bayar ke KSM;
13. Menginformasikan dan membagikan kartu peserta PKH kepada KSM apabila ada yang baru;
14. Menyusun dan melaporkan seluruh pekerjaan pendamping setiap bulan dengan format penulisan pada format laporan bulanan pendamping yang diatur dalam petunjuk teknis laporan bulanan pendamping.
15. Laporan dibuat setiap bulan tanggal 5 (lima) ditujukan kepada UPPKH Kab/kota, Korwil dan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan UPPKH Pusat;
16. Mengisi secara periodic Catatan Kegiatan Pendamping (CKP) per bulan.

Pelaksanaan tugas pendamping yang sesuai dengan keputusan Direktur Jaminan Sosial tersebut dapat menjadi acuan efektif atau tidaknya pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu para pendamping harus memperhatikan dengan pasti setiap tugas yang telah di tentukan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.

Salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang menjalankan Program Keluarga Harapan yaitu Kota Tasikmalaya. Berdasarkan keputusan dari Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat, pada tahun 2013 Kota Tasikmalaya menjalankan Program Keluarga Harapan dengan jumlah pendamping mencapai 61 orang yang dibagi pada 10 kecamatan.¹⁰

¹⁰ Ibid., _

Berdasarkan dari pengamatan awal yang dilakukan di UPPKH yang berada di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ternyata terdapat beberapa masalah yang berkenaan dengan peran pendamping dan tingkat efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kenyataan menunjukkan laporan realisasi anggaran tahun 2013, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA PKH
TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA

NO	KECAMATAN	JML RTSM	TOTAL ALOKASI	REALISASI PEMBAYARAN TAHAP 1 GELOMBANG 1		SISA REALISASI PEMBAYARAN TAHAP 1	
				RTSM	PEMBAYARAN	RTSM	ALOKASI
1	MANGKUBUMI	3.242	2.091.350.000	3.235	2.055.275.000	7	3.655.000
2	PURBARATU	1.506	974.300.000	1.498	954.920.000	8	4.320.000
3	CIPEDES	1.816	1.187.300.000	1.805	1.163.325.000	11	5.815.000
4	INDIHIANG	1.646	1.058.050.000	1.644	1.040.335.000	2	1.205.000
5	CIHIDEUNG	1.323	862.525.000	1.321	843.340.000	2	955.000
6	KAWALU	3.262	2.072.350.000	3.254	20.535.035.000	8	4.695.000
7	TAWANG	835	549.250.000	834	540.435.000	1	415.000
8	BUNGURSARI	1.623	1.054.400.000	1.623	1.038.170.000		
9	CIBEUREUM	2.111	1.336.425.000	2.103	1.310.745.000	8	4.570.000
10	TAMANSARI	4.126	2.601.425.000	4.119	2.655.510.000	7	4.655.000
TOTAL		21.480	13.787.375.000	21.436	13.542.190.000	54	30.285.000

(Sumber : Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.2
DATA PENDAMPING KECAMATAN MANGKUBUMI DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	FEMY RAHMANDARI	SAMBONGPARI	WIWIN WARIANI	540.000	NON ELIGIBLE
			EPONG HASNAH	540.000	NON ELIGIBLE
2	NITA DIANTI SEPIANI	CIPAWITRA	SAROH	540.000	NON ELIGIBLE
			SUMARNI	415.000	NON ELIGIBLE
			NINA MARLINA	665.000	NON ELIGIBLE
			ENUNG	540.000	NON ELIGIBLE
			INA MARLINA	415.000	NON ELIGIBLE

(Sumber: Di Olah Oleh Peneliti Berdasarkan Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.3
DATA PENDAMPING KECAMATAN PURBARATU DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	YADI MULYADI	SINGKUP	ANI NURPARIDAH	665.000	NON ELIGIBLE
			AI ANNISA ROHMATUNISA	665.000	NON ELIGIBLE
			UUN R	540.000	NON ELIGIBLE
			EUIS ROHAYATI	415.000	NON ELIGIBLE
			MARLINAH	540.000	NON ELIGIBLE
2	TRI RIZKIANA	SUKAJAYA	AI ROHAYATI	415.000	NON ELIGIBLE
3	MUSLIM MUSTAKIM	PURBARATU	CICIH	540.000	NON ELIGIBLE
			ONAH	540.000	NON ELIGIBLE

(Sumber : Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.4
DATA PENDAMPING KECAMATAN CIPEDES DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	NUR ULFA IQLIMA	NAGARASARI	TINI MARTINI	540.000	NON ELIGIBLE
2	EVA RUPAIDAH	PANGLAYUNGAN	ADE TATI	540.000	NON ELIGIBLE
			EUIS	540.000	NON ELIGIBLE
			SITI NURZANAH	540.000	NON ELIGIBLE
3	KIKI ZAKIYATUSYA HIDAH	SUKAMANAH	HENDRAYANI	665.000	NON ELIGIBLE
			YUYUN ROYANI	540.000	NON ELIGIBLE
4	MELINDA DEWI AMELIA	CIPEDES	ETI S	540.000	NON ELIGIBLE
			KUSIAH	415.000	NON ELIGIBLE
			IKEU ROMANTIKA	540.000	NON ELIGIBLE
			MIMI	540.000	NON ELIGIBLE
			ROHAYATI	415.000	NON ELIGIBLE

(Sumber : Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.5
DATA PENDAMPING KECAMATAN INDIHIANG DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	DEWI KARTIKASARI	SUKAMAJUKALER	SURTINAH	665.000	NON ELIGIBLE
2	EKA SARIKUSUMAH	INDIHIANG	MAMAH	540.000	NON ELIGIBLE

(Sumber: Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.6
DATA PENDAMPING KECAMATAN CIHIDEUNG DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	HILMI MA'SUM	ARGASARI	YATI HUTANINGSIH	540.000	NON ELIGIBLE
2	SRI HARDIYANI AHMAD	TUGURAJA	DEDEH	415.000	NON ELIGIBLE

(Sumber: Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.7
DATA PENDAMPING KECAMATAN KAWALU DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	EVI LUTVIAH	KARANGANYAR	ANIS	540.000	NON ELIGIBLE
2	LEISA DERA	TANJUNG	OTIK	540.000	NON ELIGIBLE
3	YUNI KRISMIYATI	GUNUNGGEDE	ATIK	915.000	NON ELIGIBLE
			MARIAH	540.000	NON ELIGIBLE
			NINA NASRIDAH	665.000	NON ELIGIBLE
4	METI RAHMAWATI	CILAMAJANG	NURJANAH	540.000	NON ELIGIBLE
			ELA KARTINI	540.000	NON ELIGIBLE
5	HILMI SYAMSU	URUG	JUBAEDAH	415.000	NON ELIGIBLE
			MIMI	540.000	NON ELIGIBLE
			ROHAYATI	415.000	NON ELIGIBLE

(Sumber : Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.8
DATA PENDAMPING KECAMATAN TAWANG DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	LINA MARLINA MISBAH	LINGKONGSARI	YAYAH S	415.000	NON ELIGIBLE

(Sumber: Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.9
DATA PENDAMPING KECAMATAN CIBEUREUM DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	INTAN NURAZIZAH	MARGABAKTI	BUDI BUDIMAN	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
		AWIPARI	ECIH	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			NUNUNG	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
2	LUDFIA DWI WAHYUNINGRUM	SETIANAGARA	IKAH	665.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			OOM SRI ROHMAH	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
3	ARIP TIRTANA	CIAKAR	IDA	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
4	ASTARI KARTIKA	KOTABARU	ENDAH ROHANAH	415.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
5	EKA NURLITA	SETIAJAYA	ELIS RAMAYANI	790.000	<i>NON ELIGIBLE</i>

(Sumber : Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.10
DATA PENDAMPING KECAMATAN TAMANSARI DAN DATA RTSM YANG TIDAK
TERBAYARKAN TAHAP IV GELOMBANG 9 TAHUN 2013
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENDAMPING	KELURAHAN	NAMA PESERTA PKH	TOTAL TERIMA	KET
1	BUDIANSYAH	SETIAWARGI	SARIPAH	790.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			AMAH	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			SUNANTI	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
2	DWI AGUSTIN	MULYASARI	MUMU MUNAWAROH	915.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			AI SOLIHAN	665.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			NENG MULYATI	540.000	<i>NON ELIGIBLE</i>
			AI SUNDARI	665.000	<i>NON ELIGIBLE</i>

(Sumber : Di Olah Oleh Peneliti berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa adanya sisa realisasi pembayaran. Dari keterangan pada tabel 1.2 sampai pada tabel 1.9 mengenai data yang tidak terbayarkan setiap kecamatan pada tahun IV gelombang 9 tahun 2013 tersebut ternyata semua RTSM termasuk “*NON ELIGIBLE*” yaitu sudah tidak memenuhi syarat sebagai peserta penerima PKH. Hal itu menunjukkan belum optimalnya tugas pendamping dalam melakukan pemutakhiran data RTSM yang akan menerima dana bantuan PKH.

Melihat latar belakang masalah tersebut, mendorong peneliti untuk mengetahui tentang keberadaan peran pendamping Program Keluarga Harapan. Sehingga peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Peran Pendamping dalam Efektivitas Pelaksanaan

Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai :

“Belum optimalnya tugas pendamping dalam melakukan pemutakhiran data RTSM yang akan menerima dana bantuan PKH.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar peran pemungkinan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya?
2. Seberapa besar peran penguatan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya?
3. Seberapa besar peran perlindungan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya?

4. Seberapa besar peran pendudukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya?
5. Seberapa besar peran pemungkinan, penguatan, perlindungan dan pendudukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemungkinan atau fasilitasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran penguatan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar peran perlindungan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui seberapa besar peran pendudukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.
5. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemungkinan, penguatan, perlindungan dan pendudukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan

program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya :

- a. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberikan saran praktis dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah mengenai peranan pendamping dalam efektivitas pelaksanaan dan bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.
- b. Kegunaan Teoritis, diharapkan dari penelitian ini adalah dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran keilmuan dan dalam pengembangan konsep serta teori Administrasi Negara dalam hal peran pendamping dalam efektivitas pelaksanaan dan bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

F. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan sebuah program dalam mencapai sasaran dan tujuannya ditentukan oleh individu yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaannya. Begitu pun program pemerintah yang berkaitan dengan program bantuan sosial untuk masyarakat. Dalam sistem pemberdayaan masyarakat tersebut membutuhkan satu tim pelaksana yang menjadi wakil pemerintah daerah.

Dalam Program Keluarga Harapan, Peserta yang akan menerima dana bantuan membutuhkan tenaga pendamping sebagai wakil pemerintah daerah. Pendamping sosial

hadir sebagai agen perubah yang terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka.¹¹ Pendamping direkrut melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan masyarakat penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.

Untuk menjembatani implementasi penerima PKH dengan pihak lainnya yang terkait dengan tingkat kecamatan maupun program di tingkat kabupaten/kota, diperlukan peran pendamping yang bertugas sebagai pengawas dan pendamping peserta dalam memenuhi komitmennya.

Menurut Edi Suharto (2012), bahwa peran pendamping umumnya yaitu sebagai :¹²

1. Pemungkinan atau Fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Sumber dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup), sumber interpersonal (sistem pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksi formal dengan orang lain) dan sumber sosial (respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya).

2. Penguatan

Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

¹¹ Edi Suharto. 2012. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat 'Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung. Hlm: 93.

¹² Ibid., hlm: 95.

3. Perlindungan

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Pendukungan

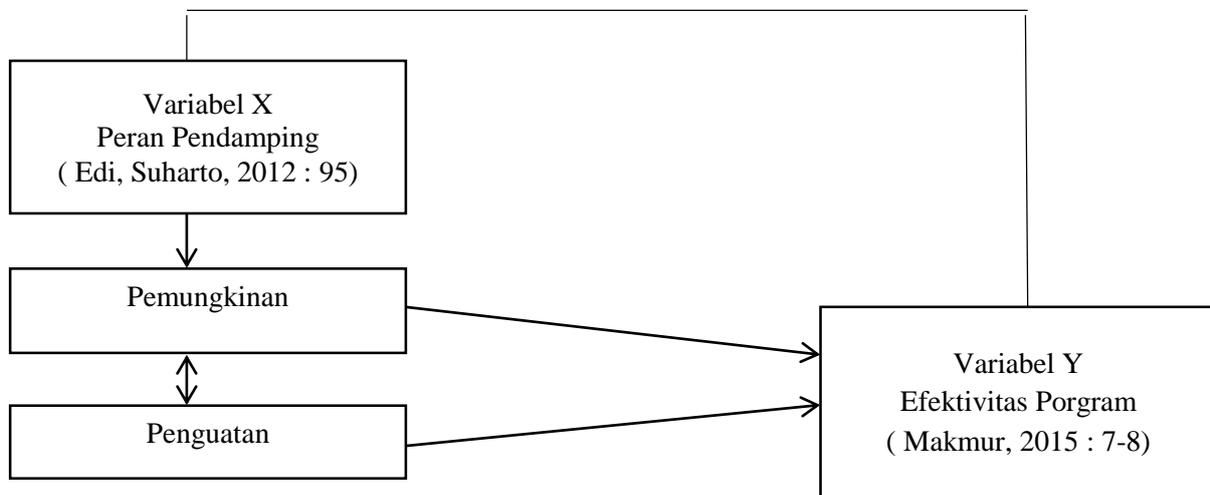
Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Seperti : melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Dimana kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain :¹³

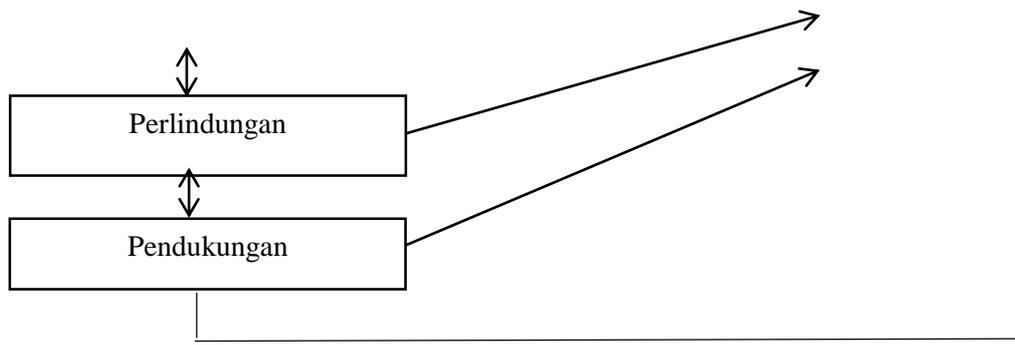
1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan berpikir
3. Ketepatan dalam menentukan tujuan
4. Ketepatan sasaran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti menuangkannya dalam sebuah skema penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



¹³ Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama. Bandung : 7-8.



(Sumber : Diolah oleh peneliti. 2016)

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ = Terdapat peran pemungkinan atau fasilitasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

H₂ = Terdapat peran penguatan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

H₃ = Terdapat peran perlindungan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

H₄ = Terdapat peran pendukung dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.

H₅ = Terdapat peran pemungkinan, penguatan, perlindungan dan pendukung dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana bantuan program keluarga harapan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG